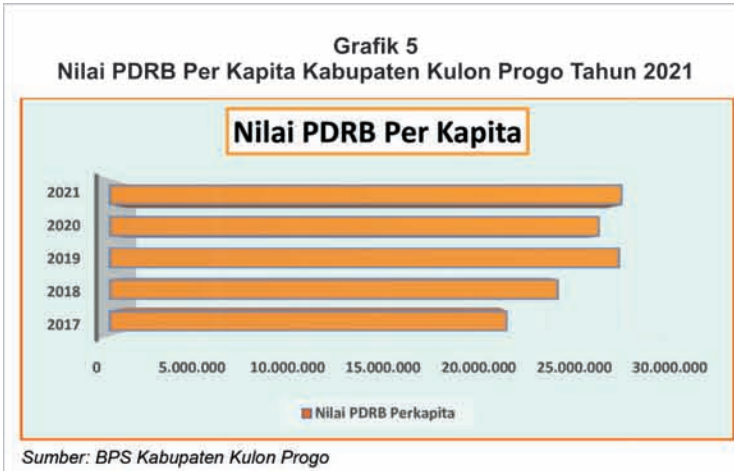




6. Ketimpangan Pendapatan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Rasio Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Pada tahun 2021 angka Gini Rasio Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,37menurun dibanding tahun 2020 sebesar 0,38. Hal ini dikarenakan banyaknya program-program yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan pada masa pandemi.



D. Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan.

Kinerja bidang pendidikan dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:

Pada tahun 2021Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar mencapai 93,98%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya anak usia 5-6 tahun yang telah masuk SD dan anak usia 7 tahun yang masih mengikuti pendidikan PAUD/TK serta masih adanyaanak usia 12 tahun yang telah mengikuti pendidikan SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama mencapai 95,22%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya anak usia kurang dari 12 tahun yang telah masuk SMP dan usia 13 tahun yang masih mengikuti pendidikan SD serta masih adanya anak usia 15 tahun yang telah mengikuti pendidikan SMA.

Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar mencapai 0,01% sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Menengah Pertama mencapai 0,06%.

Bidang Kesehatan

Upaya peningkatan bidang Kesehatan perlu dipandang sebagai suatu investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kinerja bidang kesehatan dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo padatahun 2021sebesar75,27 tahun atau lebih tinggi 0,3 tahun dari tahun 2020yang hanya sebesar 75,24 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat.

Angka Kematian Ibu tahun 2021 sejumlah 10 orang atau sebanyak 222,17 per 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab dari kematian ibu di Kabupaten Kulon Progo adalah karena adanya penyakit penyerta yang diderita.

Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi tahun 2021 sejumlah 54 bayi atau sebanyak 12,00 per 1.000 Kelahiran Hidup. Penyebab dari kematian bayi di Kabupaten Kulon Progo paling banyak disebabkan karena Asfiksia.

Sementara terkait dengan capaian pelayanan minimal bidang kesehatan secara umum belum mencapai target dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib yang erat kaitannya dengan pemenuhan dasar masyarakat dalam hal infrastruktur.

Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo disebabkan beberapa faktor, antara lain kondisi geografis wilayah Kulon Progo yang sebagian merupakan kawasan berbukitan sehingga mengakibatkan kondisi tanah tidak terlalu stabil. Selain itu kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut material lebih mempercepat penurunan kualitas jalan. Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2021 sebesar72,01%.

Capaian jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga mencapai 93,98%.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih tingginya angka defisit rumah (backlog) dan rumah kosong (housing stock), kawasan kumuh dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan kesadaran masyarakat masih rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi mengenai pembiayaan perumahan. Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) masih lemah.Capaian Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2021 sebesar5,65% menurun dibanding tahun 2020sebesar6,03%.

Bidang Sosial

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai

berbagai dimensi (multi kompleks) sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan secara menyeluruh (holistik), terpadu dan berkelanjutan. Masalah sosial bersifat relatif, namun di masyarakat sering muncul berbagai kejadian dan kemudian disebut masalah sosial.

Pada tahun 2021 penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti mencapai 99,83%. Kemudian, korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah mencapai 100%.

Saat ini Kabupaten Kulon Progo masih belum memiliki shelter atau rumah singgah yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis. Hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipenuhi guna menunjang pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Pelayanan terhadap adanya gangguan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah telah dapat dilaksanakan seluruhnya.

Dari 695 jenis pelanggaran dan pengaduan tranitibum, seluruhnya sudah dapat ditangani atau mencapai 100%.

Sementara terkait dengan hal kebencanaan, terhadap kejadian bencana yang terjadi telah diberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Layanan evakuasi dan penyelamatan pada tahun 2021 dilakukan terhadap 9.443 jiwa baik dari kejadian bencana alam atau non alam. Sedangkan upaya pencegahan serta edukasi tentang perlunya kesiapsiagaan terhadap bencana telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

E. Hasil EPPD dan Opini LKPD Tahun Lalu

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara tepat waktu.

Namun demikian, terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum memperolehinformasi hasil evaluasi dimaksud. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri belum menginformasikan kembali terkait hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga yang terakhir diterima oleh seluruh daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu piagam penghargaan atas prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2019. Adapun dalam penghargaan tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh skor 3,4667 dan status kinerja Sangat Tinggi.

Kemudian, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyampaiakannya secara tepat waktu. Atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2021 tersebut, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu,terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya. Diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya.

Gambar 2
Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Opini WTP



F. Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.570.796.118.095,72 dengan realisasi sebesar Rp 1.533.843.792.142,73 atau 97,65%. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik atas komponen pendapatan daerah berikut:

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Pendapatan Asli Daerah	246.596.642.330,72	307.154.068.135,73	124,56
2. Dana Perimbangan	972.584.548.295,00	972.693.432.737,00	100,01
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.461.080.000,00	48.299.419.000,00	99,67
Jumlah	1.267.642.270.625,72	1.328.146.919.872,73	108,08

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo

2. Belanja

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp 1.657.347.485.069,21 dengan realisasi sebesar Rp 1.404.812.208.860,05 atau 84,76%. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	1.657.347.485.069,21	1.404.812.208.860,05	84,76
1	Belanja Operasi	949.692.989.618,16	781.274.058.571,00	82,26
2	Belanja Modal	216.434.342.588,00	202.834.617.228,00	93,72%
3	Belanja Tak Terduga	17.279.688.430,00	3.432.978.345,00	19,87%
4	Belanja Transfer	178.839.734.621,00	82.713.336.034,00	46,25%

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo

3. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2021 adalah Rp86.620.934.756,49 atau 100,08% dari anggaran sebesar

Rp86.551.366.973,49.Hal tersebut dapat dilihat dari grafik atas komponen pendapatan daerah berikut:

Tabel 6
Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Penerimaan Pembiayaan	141.788.201.409,49	141.857.769.192,49	100,05
2. Pengeluaran Pembiayaan	55.236.834.436,00	55.236.834.436,00	100,00
Pembiayaan Netto	258.301.284.301,81	256.487.131.139,81	98,99

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo

G. Inovasi Daerah

Sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah pada tahun 2021 telah dihasilkan 102 satuan inovasi daerah.

Terhadap inovasi – inovasi tersebut, Kabupaten Kulon Progo memperoleh prestasi dalam kompetisi inovasi tingkat nasional maupun tingkat internasional pada tahun 2021, diantaranya penghargaan sebagai Kabupaten Inovatif dari Menteri Dalam Negeri padalInnovative Government Award (IGA) 2021 peringkat 37 dari 415 kabupaten, dan peringkat 1 di tingkat DIY.

Kabupaten Kulon Progo juga menerima penghargaan sebagai “50 outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan hasil penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dalam kategori Sangat Baik masuk peringkat ke-23 dari 405 Kabupaten dan merupakan satu-satunya wakil dari DIY.

Gambar 3
Inovasi Cabai PaKu sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Gambar 4
Pemerintah Daerah dengan hasil penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dalam kategori Sangat Baik



Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menerima penghargaan atas Inovasi Posbindu SENTOSA sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Gambar 5
Inovasi Posbindu SENTOSA sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021



Demikian Ringkasan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas dukungan serta partisipasi dari segenap komponen masyarakat, pelaku usaha, segenap aparatur pemerintah daerah, serta dukungan dan kerja sama DPRD serta instansi vertikal daerah atas partisipasi dan kinerjanya sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya kami menerima saran dan kritik dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah demi perkembangan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo di masa mendatang. Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Wates, 21 Maret 2022

BUPATI KULON PROGO

Drs. H. SUTEDJO